



PUTUSAN

Nomor 4056 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERI bin SABTU**;
Tempat Lahir : Penarah-Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 12 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanjung Judah, RT.002, RW.002, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4056 K/Pid.Sus/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 2 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI bin SABTU bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri bin Sabtu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna merah merek Oppo F7 yang berisikan simcard Telkomsel nomor 081364645908;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 23 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI bin SABTU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah yang berisikan SimCard Telkomsel nomor 081364645908;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4056 K/Pid.Sus/2020



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 15 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 23 Januari 2020 yang dimintakan banding, sekedar tentang biaya perkara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HERI bin SABTU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah yang berisikan SimCard Telkomsel nomor 081364645908;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.K/2020/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.K/2020/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Mei 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4056 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

A. Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru menilai dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanpa memberi alasan-alasan dan pertimbangan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menurut penilaian Pengadilan Tinggi sudah tepat dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi sendiri;
2. Bahwa keberatan Terdakwa mengenai penerapan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam jaringan pengedaran Narkotika sabu antar Negara (Malaysia-Indonesia) dimana Terdakwa berperan aktif menjemput Narkotika sabu ke tengah laut dengan speedboat dan membawanya ke rumah Wati untuk nantinya dibawa oleh M. Frenky Pratama dan kawan-kawan ke Surabaya merupakan bagian dari peredaran Narkotika;
3. Bahwa jumlah sabu dalam perkara *a quo* sangat banyak yaitu dalam 1 (satu) goni warna merah yang didalamnya terdapat speaker berisi 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ikut melakukan perbuatan membawa barang berisi sabu dan mendapat upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk pekerjaan dalam perkara ini Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa bagi sebagai upah kerja kepada Pendi,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4056 K/Pid.Sus/2020



Jeffriden, Adi (DPO), Botak (DPO), Andre (DPO) dan lain-lain dengan bagian Terdakwa adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut pembebanan biaya perkara yang menurut Penuntut Umum berdasarkan Pasal 222 KUHP menentukan setiap orang yang dipidana dibebani membayar biaya perkara, akan tetapi Mahkamah Agung selama ini berpendirian berdasarkan Pasal 67 KUHP yang menentukan jika dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhi hukuman lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman Putusan Hakim;
2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 menentukan walaupun biaya perkara bukan sebagai jenis hukuman berdasarkan Pasal 10 KUHP, namun atas dasar prikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebani kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HERI bin SABTU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H..

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4056 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4056 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)